

TEORI-TEORI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM BIDANG PENDIDIKAN: ANALISIS KONSEPTUAL ATAS RELEVANSI MODEL RASIONAL, INKREMENTAL, MIXED SCANNING, DAN ADVOKASI-KOALISI

Ika Fiisyatil Kamila¹, Saiful Hadi²
rikavi220@gmail.com¹, saifulhadi.iainmadura@gmail.com²
Universitas Islam Negeri Madura

ABSTRAK

Kebijakan publik dalam bidang pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam membangun peradaban bangsa. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya lahir dari proses pembelajaran di kelas, melainkan juga dari arah kebijakan yang terstruktur, partisipatif, dan adaptif. Artikel ini menganalisis secara konseptual teori-teori kebijakan publik, khususnya model rasional, inkremental, mixed scanning, advokasi-koalisi, serta model lainnya, dan mengkaji relevansinya dalam pengambilan keputusan pendidikan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa teori kebijakan publik tidak dapat dipahami secara eksklusif, melainkan hadir sebagai pendekatan yang saling melengkapi. Model rasional menekankan penggunaan data dan tujuan yang jelas, model inkremental menekankan penyesuaian bertahap, model mixed scanning menggabungkan visi strategis dan langkah taktis, sementara advokasi-koalisi menyoroti pentingnya peran kelompok kepentingan. Artikel ini menegaskan bahwa integrasi berbagai model dapat memperkuat kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap tantangan lokal maupun global.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pendidikan, Model Rasional, Inkremental, Mixed Scanning, Advokasi-Koalisi.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan instrumen negara dalam mengarahkan pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik menempati posisi yang sangat strategis, karena menentukan arah pengembangan sumber daya manusia, pemerataan kesempatan belajar, serta peningkatan mutu layanan pendidikan. Pendidikan bukan hanya aktivitas pembelajaran di ruang kelas, melainkan juga sebuah sistem sosial yang kompleks, yang melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah, pendidik, orang tua, hingga masyarakat luas. Oleh sebab itu, setiap keputusan kebijakan pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas kehidupan bangsa.

Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, tantangan dunia pendidikan semakin beragam.¹ Perubahan teknologi, kebutuhan akan kompetensi abad 21, serta tuntutan daya saing global mendorong negara-negara untuk terus melakukan inovasi kebijakan pendidikan. Indonesia pun tidak terkecuali. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi persoalan mendasar dalam pendidikan, antara lain: kesenjangan mutu antar wilayah, keterbatasan infrastruktur pendidikan, profesionalisme tenaga pendidik yang belum merata, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.² Permasalahan ini tidak mungkin diatasi hanya dengan praktik teknis pembelajaran, melainkan membutuhkan desain kebijakan publik yang tepat, strategis, dan adaptif.

Teori kebijakan publik hadir sebagai kerangka konseptual yang membantu menjelaskan bagaimana suatu kebijakan dirumuskan, dinegosiasikan, dilaksanakan, hingga dievaluasi.³ Teori-teori ini juga penting untuk memahami dinamika politik, ekonomi, dan

sosial yang memengaruhi kebijakan. Misalnya, model rasional menekankan pentingnya analisis berbasis data, model inkremental mengajarkan nilai penting dari penyesuaian bertahap, model mixed scanning menawarkan kombinasi antara visi strategis dan fleksibilitas, sementara model advokasi-koalisi menyoroti peran aktor-aktor non-pemerintah dalam membentuk arah kebijakan. Dengan memahami berbagai teori tersebut, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang proses kebijakan pendidikan yang pada kenyataannya sangat kompleks.

Artikel konseptual ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai teori-teori kebijakan publik dan relevansinya dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Kajian ini penting secara akademis karena dapat memperkaya literatur ilmu kebijakan, khususnya dalam bidang pendidikan, sekaligus penting secara praktis karena memberikan landasan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya berfungsi sebagai analisis teoretis, tetapi juga sebagai refleksi kritis terhadap dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Model Rasional

Model rasional berangkat dari asumsi bahwa kebijakan dapat dibuat secara sistematis melalui identifikasi masalah, pengumpulan data, penentuan tujuan, eksplorasi alternatif, dan pemilihan opsi terbaik. Model ini menekankan logika dan efisiensi.

Dalam pendidikan, penerapan model rasional tampak pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek, perencanaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), atau pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran. Keunggulannya adalah memberikan dasar yang kuat untuk keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).⁴ Namun, model ini seringkali dikritik terlalu idealis, karena dalam praktiknya, data tidak selalu lengkap, waktu terbatas, dan kepentingan politik ikut memengaruhi arah kebijakan.⁵

Model Inkremental

Model inkremental menyatakan bahwa kebijakan publik seringkali lahir dari penyesuaian kecil terhadap kebijakan sebelumnya, bukan dari perubahan total. Fokusnya adalah pada pragmatisme, kompromi, dan realitas politik.

Dalam pendidikan Indonesia, contoh penerapan model ini adalah perubahan bertahap dari Ujian Nasional ke Asesmen Nasional. Alih-alih menghapus total sistem evaluasi, pemerintah memilih memperbaiki indikator dan metode pengukuran mutu. Model ini memudahkan penerimaan publik, tetapi dikritik kurang progresif dalam menghadapi tantangan besar seperti kesenjangan mutu antar daerah.⁶

Model Mixed Scanning

Mixed scanning sebagai sintesis antara rasional dan inkremental. Model ini menggunakan analisis mendalam untuk keputusan strategis, sambil tetap fleksibel dengan penyesuaian bertahap dalam implementasi.

Dalam konteks pendidikan, model ini relevan untuk kebijakan digitalisasi sekolah atau program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pemerintah menetapkan visi jangka panjang, misalnya transformasi digital dalam pembelajaran, namun dalam implementasi dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan infrastruktur dan sumber daya guru. Model ini dinilai efektif karena mampu menjaga arah strategis sekaligus realistis dalam penerapan.⁷

Model Advokasi-Koalisi

Advocacy Coalition Framework (ACF) menekankan bahwa kebijakan adalah hasil interaksi kelompok kepentingan yang berbagi ideologi, nilai, dan keyakinan. Kebijakan

lahir dari kompetisi maupun kolaborasi koalisi advokasi yang memengaruhi agenda pemerintah.

Dalam pendidikan, hal ini terlihat pada perdebatan kurikulum merdeka, pendidikan karakter, dan moderasi beragama. Aktor yang terlibat tidak hanya pemerintah, tetapi juga akademisi, LSM, organisasi profesi guru, hingga tokoh agama. Teori ini menegaskan bahwa dimensi politik dan nilai sama pentingnya dengan dimensi teknokratis dalam proses kebijakan pendidikan.⁸

Model-Model Lainnya

Selain empat model utama, terdapat model lain yang memperkaya analisis:

- Model Garbage Canyon menyoroiti ketidakpastian dan “kebetulan” dalam proses kebijakan. Dalam pendidikan, terkadang keputusan diambil secara cepat tanpa analisis mendalam, misalnya kebijakan darurat saat pandemi COVID-19.⁹
- Model Sistem yang memandang kebijakan sebagai hasil dari interaksi input (tuntutan masyarakat) dan output (keputusan pemerintah). Dalam pendidikan, aspirasi publik mengenai akses pendidikan berkualitas menjadi input yang kemudian diproses menjadi kebijakan BOS atau KIP.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan teori kebijakan publik dalam bidang pendidikan memiliki relevansi yang sangat penting karena kebijakan pendidikan menyangkut kepentingan luas, melibatkan banyak aktor, dan berdampak jangka panjang. Teori-teori kebijakan publik tidak hanya membantu menjelaskan bagaimana suatu kebijakan lahir, tetapi juga memberikan arah bagi pengambil keputusan untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.¹¹

Model Rasional: Relevansi pada Perencanaan Berbasis Data

Model rasional sangat relevan dalam pengambilan keputusan pendidikan yang membutuhkan perencanaan strategis jangka panjang. Misalnya, dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020–2035, pemerintah membutuhkan analisis data demografis, kebutuhan tenaga kerja, serta perkembangan teknologi global.¹² Dengan kerangka rasional, kebijakan pendidikan dapat dirancang untuk memastikan kesesuaian antara tujuan nasional (seperti peningkatan daya saing bangsa) dan implementasi kebijakan di lapangan. Relevansi model ini terletak pada kemampuannya mendorong penggunaan evidence-based policy, sehingga keputusan pendidikan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memiliki landasan ilmiah yang kuat.¹³

Namun, dalam praktiknya, model rasional juga menghadapi keterbatasan, seperti kurangnya ketersediaan data yang valid dan kendala birokrasi. Oleh karena itu, model ini lebih relevan digunakan pada tahap perencanaan makro kebijakan pendidikan daripada implementasi harian yang penuh dinamika.

Model Inkremental: Relevansi pada Stabilitas dan Keberlanjutan

Dalam konteks pendidikan yang kompleks dan seringkali politis, model inkremental relevan karena menekankan perubahan bertahap. Contohnya adalah transisi dari Ujian Nasional (UN) menuju Asesmen Nasional (AN). Alih-alih menghapus total sistem evaluasi, pemerintah melakukan revisi bertahap dengan memperkenalkan indikator kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.¹⁴

Model inkremental membantu mengurangi resistensi masyarakat terhadap kebijakan baru dan menjaga stabilitas sistem pendidikan. Relevansi model ini tampak dalam menjaga kontinuitas kebijakan pendidikan di tengah pergantian kepemimpinan politik. Kelemahannya, model ini kurang responsif terhadap persoalan yang membutuhkan perubahan cepat dan radikal, misalnya menghadapi krisis pandemi COVID-19 yang

menuntut kebijakan pendidikan darurat.

Model Mixed Scanning: Relevansi pada Transformasi Pendidikan

Model mixed scanning memiliki relevansi tinggi dalam kebijakan pendidikan yang bersifat transformasional. Misalnya, program digitalisasi sekolah dan kampus merdeka membutuhkan visi strategis jangka panjang, seperti membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi. Namun, implementasinya harus dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan infrastruktur, kemampuan guru, dan akses siswa.¹⁵

Relevansi model ini adalah pada fleksibilitasnya: kebijakan tetap memiliki arah strategis yang jelas, tetapi mampu menyesuaikan langkah-langkah teknis sesuai realitas di lapangan. Dengan demikian, mixed scanning sangat tepat untuk kebijakan pendidikan yang menasar inovasi sistemik, seperti pendidikan vokasi yang link and match dengan industri. Model Advokasi-Koalisi: Relevansi pada Isu-isu Nilai dan Politik Pendidikan

Pendidikan sering kali bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal nilai dan ideologi. Teori advokasi-koalisi menjelaskan bagaimana kebijakan pendidikan terbentuk melalui interaksi kelompok kepentingan, seperti pemerintah, akademisi, LSM, organisasi profesi guru, hingga tokoh agama.¹⁶

Misalnya, dalam perumusan Kurikulum Merdeka, terdapat perdebatan dan advokasi dari berbagai pihak terkait substansi materi, pendekatan pembelajaran, serta muatan lokal.¹⁷ Model advokasi-koalisi relevan untuk menjelaskan dinamika politik pendidikan, khususnya pada isu-isu sensitif seperti pendidikan agama, pendidikan karakter, dan moderasi beragama. Kelebihannya adalah memberikan ruang partisipasi luas, tetapi kelemahannya adalah potensi tarik-menarik kepentingan yang dapat memperlambat proses kebijakan.

Model Lainnya: Relevansi dalam Kondisi Krisis dan Responsif

Model garbage can relevan dalam situasi krisis di mana kebijakan pendidikan harus diambil secara cepat meskipun data terbatas. Contohnya adalah kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat pandemi COVID-19, di mana pemerintah harus segera merespons tanpa melalui perencanaan panjang. Sementara itu, model sistem relevan dalam melihat keterkaitan antara aspirasi masyarakat (input) dengan output kebijakan, misalnya tuntutan masyarakat atas pemerataan akses pendidikan yang kemudian melahirkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Implikasi Praktis

Relevansi teori kebijakan publik dalam pendidikan dapat dilihat dari tiga aspek utama:¹⁸

1. Akurasi kebijakan – model rasional dan mixed scanning membantu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran karena berbasis analisis mendalam.
2. Akseptabilitas kebijakan – model inkremental dan advokasi-koalisi memastikan kebijakan lebih diterima publik karena memperhatikan proses kompromi dan partisipasi.
3. Adaptabilitas kebijakan – model garbage can dan sistem membantu pemerintah merespons perubahan mendadak serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial.

Dengan demikian, relevansi teori kebijakan publik dalam pendidikan bukan sekadar teori akademis, tetapi menjadi panduan praktis dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang efektif, partisipatif, berkelanjutan, dan kontekstual. Integrasi antar teori inilah yang seharusnya menjadi pendekatan utama bagi para pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia.

KESIMPULAN

Teori kebijakan publik memberikan kerangka konseptual yang penting untuk memahami kompleksitas pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Model rasional relevan untuk perencanaan berbasis data, model inkremental menjaga keberlanjutan melalui perubahan bertahap, model mixed scanning menggabungkan visi strategis dan fleksibilitas implementasi, sementara model advokasi-koalisi menegaskan peran kelompok kepentingan dalam membentuk arah kebijakan. Model lain seperti garbage can dan sistem memperkaya perspektif pada kondisi krisis dan dinamika sosial. Dengan demikian, tidak ada satu model yang sepenuhnya dominan, melainkan penerapan integratif antar teori yang mampu menghasilkan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, adaptif, partisipatif, dan kontekstual dalam menjawab tantangan lokal maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, A., Saliha, A., Nugroho, A. S., & Mahendra, B. I. (2024). Analisis strategi advokasi kebijakan publik oleh Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat. *Madika: Jurnal Politik dan Governance*, 5(1), 45–58.
- Arifin, Z. (2022). Transformasi digital pendidikan: Tantangan dan strategi kebijakan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 17(1), 33–47.
- Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). Implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7094–7100.
- Fahrozi Ar-Raafi', & Efaningrum, A. (2022). Advokasi pendidikan berkebutuhan khusus: Studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Foundasia*, 13(1), 22–35.
- Fitri, A. (2024). Peran institusi pendidikan Islam dalam advokasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Jurnal Penelitian Tarbawi*, 9(1), 25–38.
- Fitriani, D. (2021). Evaluasi kebijakan pendidikan nasional: Dari ujian nasional ke asesmen nasional. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 12(2), 45–58.
- Krishannanto, D., Darmuki, A., & Fathurohman, I. (2024). Keterampilan abad 21 pada buku teks Bahasa Indonesia kelas VI kurikulum merdeka. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 119–131.
- Leni Pitri Sari, Khairiyah, M., Afriza, & Amin, M. (2024). Teori kebijakan pendidikan. *Jurnal Perubahan Ekonomi (JPE)*, 8(6).
- Lidya Fitri, F., Suanti, F., & Trisoni, R. (2024). Pengertian, konsep, teori dan lingkup sistem dan kebijakan pendidikan nasional. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(2), 298–307.
- Meilani, S., Ramadhan, S., Syamia, R., Afriza, & Rialis. (2024). Teori-teori dalam manajemen kebijakan pendidikan. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 6(5), 41–50.
- Nurhidayah, L. (2023). Kolaborasi tripusat pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(2), 119–130.
- Rosyid, M. (2020). Profesionalisme guru PAI dalam perspektif nilai-nilai Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 60–72.
- Sari, N. (2021). Kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19: Perspektif model garbage can. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(2), 99–110.
- Septianingrum, A., Suhandi, A., Putri, F., & Prihantini, P. (2022). Peningkatan kompetensi pendidik dalam literasi digital untuk menghadapi tantangan pembelajaran abad 21. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(7), 37–46.
- Suryadi, M., Sunta, M., Aprihanza, H., Safitri, R. A., & Yohanes, Y. (2024). Analisis kesenjangan dan strategi solusi dalam menghadapi krisis pendidikan di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 133–144.